



**PEMBERDAYAAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI MODEL MANAJEMEN PROYEK BERBASIS KOMITE**

*Empowering Community Development Leaders Through A Committee-Based
Project Management Model*

**Bahdin Nur Tanjung¹, Melisa Nur Asima Sidabutar², Lusi Febriyami
Sitompul³**

^{1,2,3}Universitas Efarina, Indonesia

¹Email: bahdin@utnd.ac.id

²Email: melisanurasimasidabutar@gmail.com

Abstract

This Community Empowerment (PkM) activity aims to enhance the capacity of community empowerment cadres to plan, implement, and evaluate community programs through the application of a committee-based project management model. Challenges frequently faced by cadres include unclear role distribution, coordination among stakeholders, basic budget management, activity documentation, as well as unstructured reporting and evaluation. The program is implemented through needs assessments, core project management training (planning, scheduling, budgeting, risk management), the formation of project committees and governance structures (RACI), the development of SOPs and project administration templates, implementation simulations, and mentoring for the implementation of pilot projects at the community level. Outputs include a project document package (TOR, work plan, budget estimate, risk register, logbook, reports), a project committee structure, and a simple monitoring dashboard. The expected outcomes are increased accountability, improved program implementation effectiveness, and the sustainability of community-based activities.

Keywords: Project Management; Committee; Accountability

Abstrak

Kegiatan PkM ini bertujuan meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program komunitas melalui penerapan model manajemen proyek berbasis komite. Tantangan yang sering dihadapi kader meliputi pembagian peran yang belum jelas, koordinasi antar pihak, pengelolaan anggaran sederhana, dokumentasi kegiatan, serta pelaporan dan evaluasi yang belum terstruktur. Program dilakukan melalui asesmen kebutuhan, pelatihan inti manajemen proyek (perencanaan, jadwal, anggaran, risiko), pembentukan komite proyek dan tata kelola (RACI), penyusunan SOP dan format administrasi proyek, simulasi pelaksanaan, serta pendampingan implementasi proyek percontohan di tingkat komunitas. Luaran berupa paket dokumen proyek (TOR, rencana kerja, RAB, risk register, logbook, laporan), struktur komite proyek, dan dashboard monitoring sederhana. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya akuntabilitas, efektivitas pelaksanaan program, dan keberlanjutan kegiatan berbasis komunitas.

Kata Kunci: Manajemen Proyek; Komite ; akuntabilitas



PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan penting dalam pembangunan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok dalam mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kader pemberdayaan masyarakat memiliki peran strategis sebagai penggerak utama di tingkat lokal. Mereka berfungsi sebagai fasilitator, motivator, sekaligus pelaksana berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya, banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh kader masih bersifat ad hoc, tidak terencana secara sistematis, serta minim dokumentasi dan evaluasi yang terstruktur.

Kondisi tersebut menyebabkan program yang dilaksanakan sering kali tidak mencapai hasil yang optimal dan sulit untuk direplikasi atau dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, ketergantungan terhadap individu tertentu juga menjadi salah satu kendala yang menghambat keberlanjutan program. Ketika kader yang berperan aktif tidak lagi terlibat, maka program yang telah berjalan cenderung berhenti atau mengalami penurunan kualitas. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan suatu pendekatan yang mampu memperkuat kapasitas kader dalam mengelola program secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah penerapan model manajemen proyek berbasis komite. Model ini menekankan pada pembagian peran yang jelas, pengambilan keputusan secara kolektif, serta pengelolaan program yang berbasis pada siklus manajemen proyek. Dengan adanya struktur komite yang jelas, setiap anggota memiliki tanggung jawab yang spesifik sehingga koordinasi dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, penggunaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang terstandar memungkinkan program dapat dikelola secara lebih transparan dan akuntabel.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam kegiatan ini meliputi rendahnya kemampuan kader dalam menyusun perencanaan program yang sistematis, belum adanya pembagian peran yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan kader melalui penerapan model manajemen proyek berbasis komite sehingga mereka mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program komunitas secara lebih efektif dan terstruktur.

METODE

Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kader sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran dan implementasi program. Kegiatan diawali dengan tahap asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tingkat kapasitas kader dalam mengelola program. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data melalui diskusi kelompok dan wawancara untuk memahami pengalaman kader dalam melaksanakan kegiatan serta kendala yang mereka hadapi.

Berdasarkan hasil asesmen, selanjutnya dilakukan pelatihan inti yang berfokus pada penguatan kapasitas kader dalam manajemen proyek. Materi pelatihan mencakup konsep dasar manajemen proyek, penyusunan tujuan dan

indikator, perencanaan kegiatan, pengelolaan anggaran, serta identifikasi dan mitigasi risiko. Pelatihan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dilengkapi dengan praktik langsung melalui penyusunan dokumen proyek sederhana yang dapat digunakan dalam kegiatan komunitas.

Setelah pelatihan, dilakukan pembentukan komite proyek yang berfungsi sebagai struktur organisasi dalam pelaksanaan program. Komite ini terdiri dari berbagai peran yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan, seperti ketua, sekretaris, bendahara, serta koordinator bidang. Pembentukan komite dilakukan secara partisipatif dengan mempertimbangkan kompetensi dan kesiapan masing-masing kader.

Tahap berikutnya adalah penyusunan dokumen proyek yang meliputi rencana kerja, anggaran, serta mekanisme pelaksanaan dan pelaporan. Dokumen ini disusun secara bersama-sama oleh kader dengan pendampingan dari tim pelaksana. Selain itu, dilakukan simulasi pelaksanaan proyek untuk memberikan gambaran kepada kader mengenai bagaimana program akan dijalankan di lapangan.

Implementasi dilakukan melalui proyek percontohan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Selama pelaksanaan proyek, dilakukan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan untuk menilai keberhasilan program serta mengidentifikasi pembelajaran yang dapat digunakan untuk perbaikan di masa mendatang.

HASIL

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas kader dalam mengelola program komunitas. Kader yang sebelumnya belum memiliki dokumen perencanaan yang jelas kini mampu menyusun rencana kerja yang sistematis, termasuk penentuan tujuan, jadwal kegiatan, serta anggaran yang diperlukan. Selain itu, penggunaan format dokumen yang terstandar membantu kader dalam mengelola administrasi program secara lebih tertib.

Pembentukan komite proyek juga memberikan dampak positif terhadap koordinasi pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya pembagian peran yang jelas, setiap anggota komite memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif. Keputusan yang diambil secara kolektif juga meningkatkan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan.

Dari sisi pelaksanaan, proyek percontohan yang dilakukan menunjukkan hasil yang cukup baik. Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan juga mengalami peningkatan. Selain itu, dokumentasi kegiatan yang dilakukan secara sistematis memudahkan dalam proses pelaporan dan evaluasi.

PEMBAHASAN

Penerapan model manajemen proyek berbasis komite dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang terstruktur dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan program komunitas. Dengan adanya perencanaan yang jelas, pelaksanaan program menjadi lebih terarah dan terkontrol. Selain itu, pembagian peran yang jelas dalam komite memungkinkan koordinasi yang lebih baik antar

anggota.

Keberhasilan model ini juga didukung oleh pendekatan partisipatif yang melibatkan kader secara aktif dalam seluruh proses kegiatan. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kader terhadap konsep manajemen proyek, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan program. Hal ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam implementasi model ini. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh kader, mengingat mereka juga memiliki aktivitas lain di luar kegiatan komunitas. Selain itu, kemampuan administrasi yang masih terbatas juga menjadi kendala dalam pengelolaan dokumen proyek. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang fleksibel serta penyederhanaan format dokumen agar lebih mudah digunakan oleh kader.

KESIMPULAN

Model manajemen proyek berbasis komite terbukti mampu meningkatkan kapasitas kader dalam mengelola program komunitas secara lebih sistematis, partisipatif, dan akuntabel. Melalui pembagian peran yang jelas, penggunaan dokumen yang terstandar, serta penerapan monitoring dan evaluasi yang terstruktur, program yang dilaksanakan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Penerapan model ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, serta dapat direplikasi pada berbagai jenis kegiatan komunitas lainnya dengan penyesuaian terhadap konteks lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Cincera, Jan, Petra Biberhofer, Bohuslav Binka, Johan Boman, Lisa Mindt, and Marco Rieckmann. 2018. "Designing a Sustainability-Driven Entrepreneurship Curriculum as a Social Learning Process: A Case Study from an International Knowledge Alliance Project." *Journal of Cleaner Production* 172. doi: 10.1016/j.jclepro.2017.05.051.
- Hairunisya, N. (2023). *kewirausahaan Berbasis Proyek dan HOTS Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusi* (1st ed.). Unisma Press.
- M. Rahmanto, M.Amin Widigdo, R. (2023) 'Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Urban Farming Terintegrasi Buruan SAE di Kota Bandung', in, pp. 127–132.
- Rahmanto, M., Amin Widigdo, M. S. and . R. (2018) 'REINTEPRETATION OF ISLAM AND CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT; CASE OF MAJELIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MUHAMMADIYAH', *Humanities & Social Sciences Reviews*, 6(2), pp. 127–132.
- Saputra, A., Priadi,E., & Rustamaji (2024). Analysis Of Slope Stability Due to Illegal Gold Mining In Bengkulu Regency *Jurnal Teknik Sipil*, 24 (1) 766-777.
- Situmorang, D.,M et.al"Analysis Of Accounting Knowledge Behavior and Accounting Recording on Revenue with Cultural Behavior Moderating Variable" *Al-Mal: Journal Of Islamic Accounting and Finance [ONLINE]*



Volume 05 Number 02 (Des 31, 2024)

Surya, B. et al. (2020) 'Management of slum-based urban farming and economic empowerment of the community of Makassar City, South Sulawesi, Indonesia', Sustainability (Switzerland), 12(18).

